

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh:

AMI KHAFIDA

NIM 4319135

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh:

AMI KHAFIDA

NIM 4319135

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ami Khafida
NIM : 4319135
Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Ami Khafida

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ami Khafida

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : **Ami Khafida**
NIM : **4319135**
Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Oktober 2023
Pembimbing,



Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I
NIP. 198703112019081001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:


Nama : **Ami Khafida**
NIM : **4319135**
Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022**
Dosen Pembimbing : **Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I**


Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji

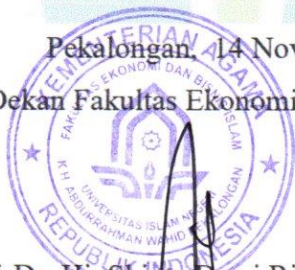
Penguji I

Penguji II


Ade Gunawan, M.M.
NIP. 198104252015031002


Ina Mutmainah, M.Ak.
NIP. 199203312019032007

Pekalongan, 14 November 2023
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

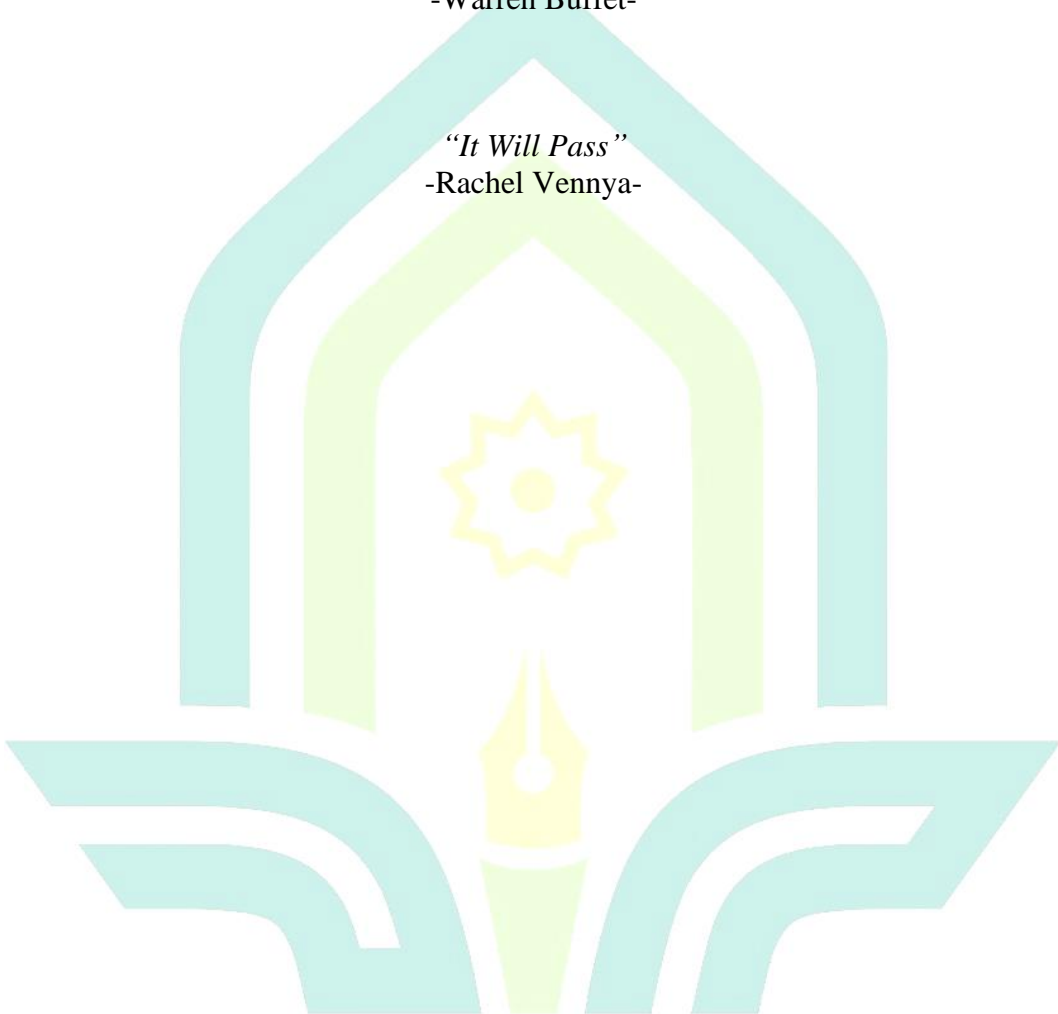

Prof. Dr. Hj. Shifra Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

“Do Your Best and Let God Do The Rest”
-Ben Carson-

“Enjoy The Process”
-Warren Buffet-

“It Will Pass”
-Rachel Vennya-



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mulari dan Ibu Kuyaemah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dengan diiringi doa kepada Allah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kakak saya tersayang Lestario dan Siti Ernaliyah yang selalu memotivasi dan memberikan pelajaran berharga serta menjadi teladan yang baik bagi saya, dan senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Dosen Pembimbing Skripsi saya Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Dosen Wali Ibu Nurfani Arisnawati, M.M. yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya selama ini.
6. Pimpinan dan seluruh staf pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang yang telah memberi ruang dan mempermudah dalam penelitian serta pengambilan data skripsi.
7. Sahabat serta teman baik saya Widiya, Ria, Adia dan Jannah yang telah kebersamai dari awal masa perkuliahan dan selalu memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Panitia Pemungutan Suara Desa Ujungnegoro 2024, Mbak Wahidah dan Mbak Wisma yang telah kebersamai saya dalam berproses serta senantiasa memberikan motivasi, semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendukung, memberikan semangat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

AMI KHAFIDA. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022.

Setiap organisasi pemerintahan memiliki kewajiban untuk selalu memperhatikan prinsip *value for money* atau nilai manfaat terhadap biaya yang dikeluarkan. Sama halnya dengan tuntutan yang diberlakukan oleh masyarakat, pemerintah harus selalu mengutamakan tanggung jawab dalam melaksanakan prinsip *value for money* terutama terkait penyediaan dan pengalokasian sumber daya. Efektivitas dan efisiensi bisa dijadikan sebagai kriteria untuk menilai prestasi sebuah organisasi menggunakan laporan realisasi anggaran yang sudah dipresentasikan sebagai wujud pertanggungjawaban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2018-2022.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif analitik. Objek pada penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang. Fokus penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang selama lima tahun (2018-2022) yang disusun oleh BPKPAD Kabupaten Batang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dari tahun 2018-2019 bervariasi. Pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022 dikategorikan efektif kemudian pada tahun 2020 termasuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa aktivitas yang dianggarkan tidak terlaksana. Sedangkan, tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dari tahun 2018-2019 secara keseluruhan termasuk dalam kategori cukup efisien. Hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran belanja belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Efektivitas, Efisiensi

ABSTRACT

AMI KHAFIDA. Analysis of the Effectiveness and Efficiency of the Implementation of the Batang Regency Regional Government Budget for the 2018-2022 Fiscal Year.

Every government organization has an obligation to always pay attention to the principle of value for money or the value of benefits to the costs incurred. Similar to the demands imposed by society, the government must always prioritize responsibility in implementing the principle of value for money, especially regarding the provision and allocation of resources. Effectiveness and efficiency can be used as criteria for assessing the performance of an organization using the budget realization report that has been presented as a form of accountability. The purpose of this study was to analyze the level of effectiveness and efficiency of the implementation of the Batang Regency Regional Government budget for the 2018-2022 fiscal year.

This type of research is included in field research with an analytical qualitative approach. The object of this research is the Batang Regency Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD). The focus of this research is the Batang Regency Regional Government budget realization report for five years (2018-2022) prepared by BPKPAD Batang Regency. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis method uses qualitative descriptive analysis using an analysis of the level of effectiveness and efficiency of the Batang Regency Regional Government budget.

The results showed that the level of effectiveness of the Batang Regency Regional Government budget from 2018-2019 varied. In 2018, 2019, 2021 and 2022 were categorized as effective, then in 2020 they were in the moderately effective category. This is because there are several budgeted activities that are not carried out. Meanwhile, the efficiency level of the Batang Regency Regional Government's expenditure budget implementation from 2018-2019 as a whole is included in the moderately efficient category. This is because the management of the expenditure budget has not succeeded in meeting the efficiency requirements, namely the use of minimum funds to achieve maximum results.

Keywords: Budget Realization Report, Effectiveness, Efficiency

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Nurfani Arisnawati, M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)

7. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 26 Oktober 2023

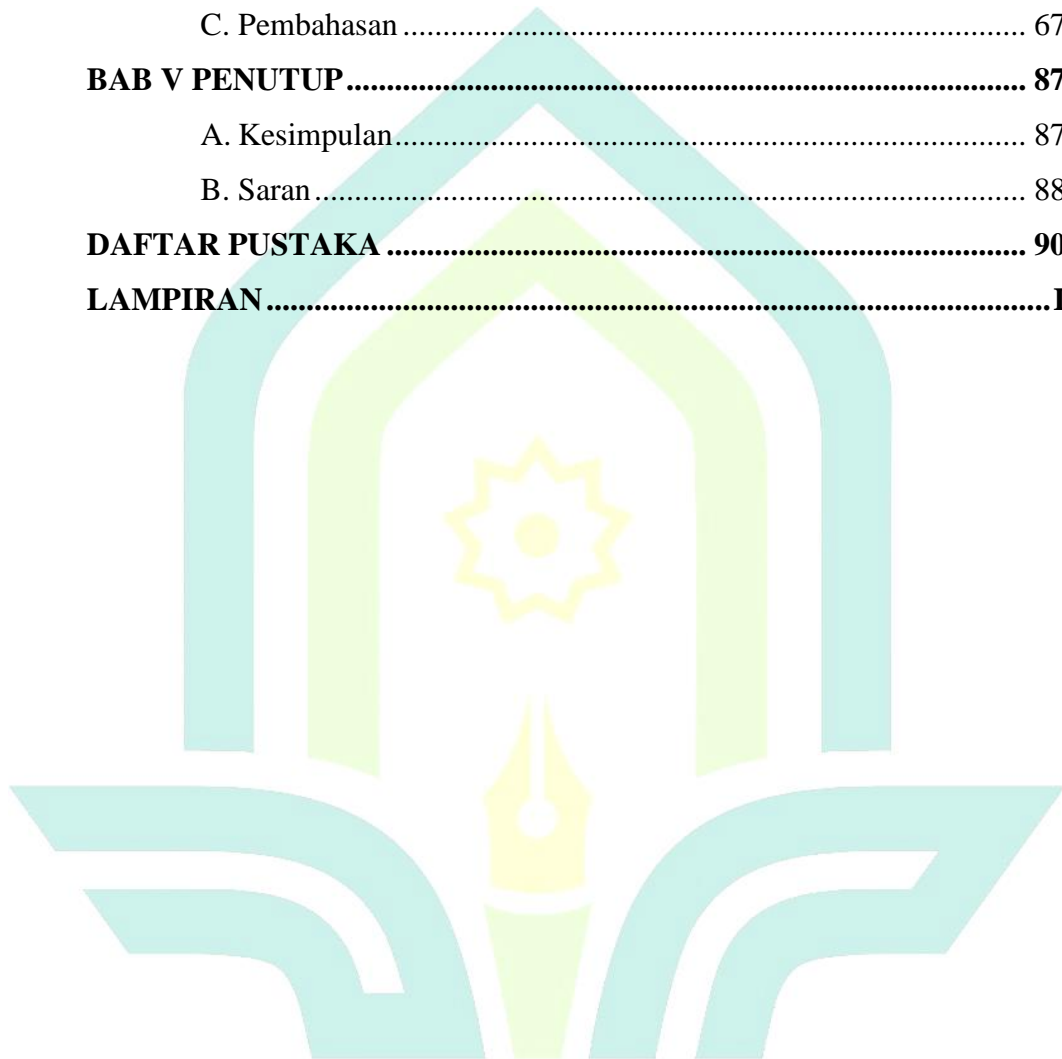


Ami Khafida

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat.....	16
D. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Landasan Teori	19
B. Telaah Pustaka.....	38
C. Kerangka Berfikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. <i>Setting</i> Penelitian.....	52
C. Subjek Penelitian.....	53
D. Sumber Data	53

E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Keabsahan Data.....	55
G. Metode Analisis Data	56
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
B. Analisis Data	66
C. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	I



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.	Fathah	A	A
◌َ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan antara harkat dan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَاوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ ...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
اُ ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

4. Ta'marbutah

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahan dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل	-ar-rajulu
السيدة	-as-sayyidah
الشمس	-asy-syamsu
القمر	-al-qamar
البدیع	-al-badi'

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

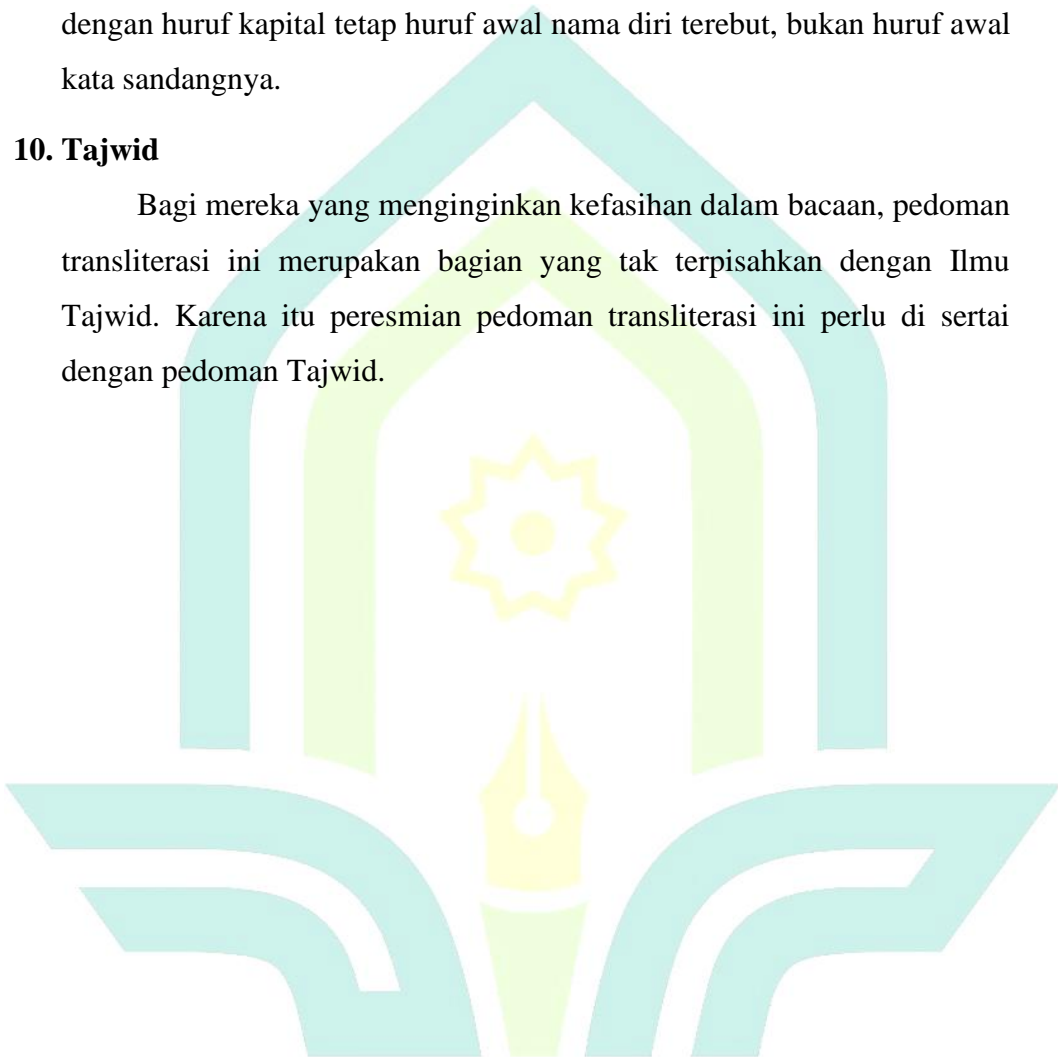
Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020.....	12
Tabel 1.2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022.....	14
Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas	33
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi.....	36
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1	Kriteria Efektivitas	57
Tabel 3.2	Kriteria Efisiensi.....	58
Tabel 4.1	Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022.....	67
Tabel 4.2	Tingkat Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022.....	70
Tabel 4.3	Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022.....	73
Tabel 4.4	Tingkat Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022.....	75
Tabel 4.5	Anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022.....	80

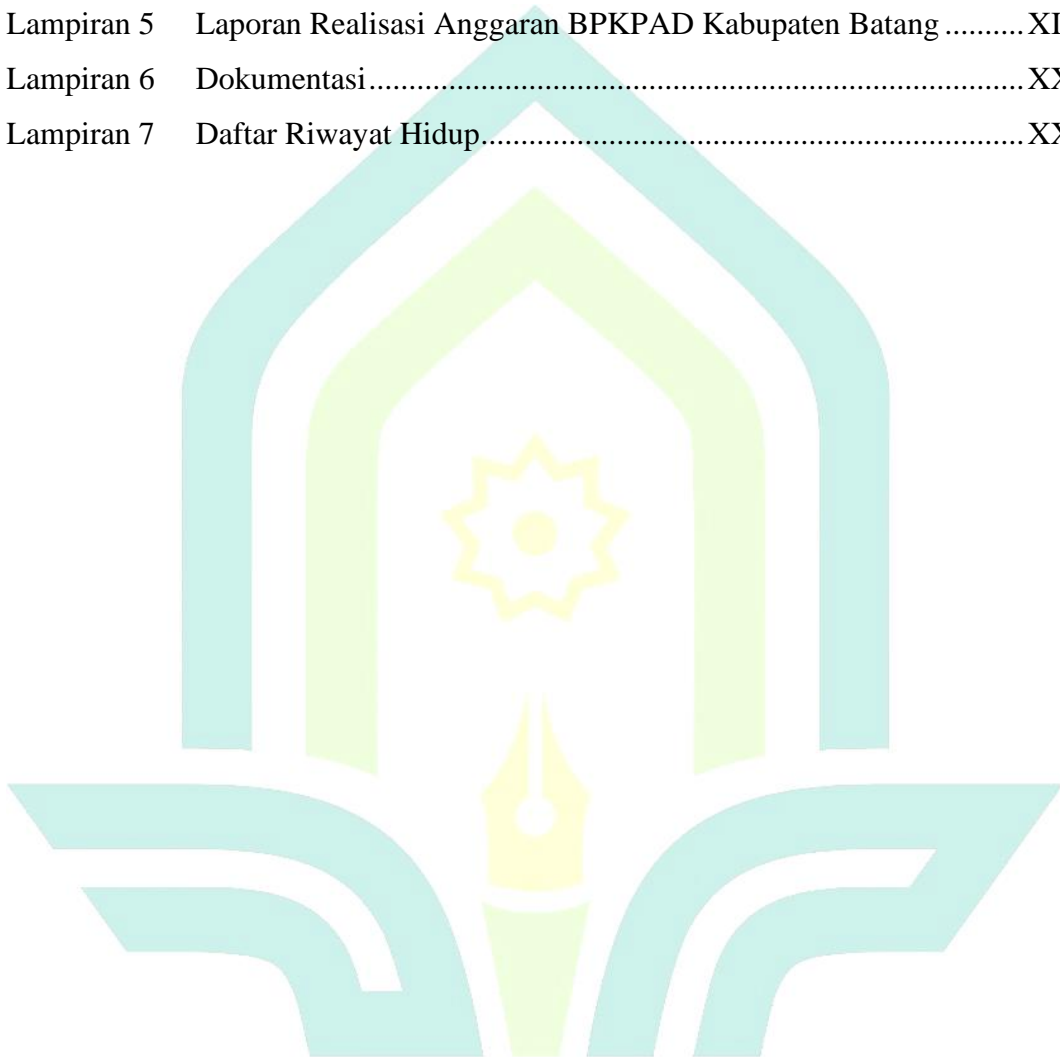
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	51
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Batang	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian	I
Lampiran 2	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	III
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	IV
Lampiran 4	Transkrip Wawancara.....	VII
Lampiran 5	Laporan Realisasi Anggaran BPKPAD Kabupaten Batang	XIV
Lampiran 6	Dokumentasi.....	XXIII
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup.....	XXIV



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya globalisasi dan tuntutan reformasi yang terus meningkat, kebutuhan akan peran akuntansi sebagai alat pencatatan menjadi sangat krusial. Perkembangan akuntansi tidak terlepas dari perkembangan dunia pemerintahan dan regulasi yang ada (Lasupu et al., 2021). Di Indonesia, pemerintahan terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dimana masing-masing memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri (D. P. Sari et al., 2023). Sebelum konsep otonomi daerah diterapkan secara meluas, sistem pemerintahan cenderung lebih sentralistik, dimana pemerintah pusat memegang kendali penuh atas berbagai aspek di seluruh wilayah pemerintahan. Otonomi daerah kemudian muncul sebagai perubahan, dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi lebih terdesentralisasi. Pergantian sistem pemerintahan tersebut bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dalam membuat keputusan kebijakan dan memperbaiki kualitas pemerintahan, sekaligus menciptakan tata kelola yang efisien serta efektif dalam menghadapi tantangan yang kompleks (Widowati & Fatimah, 2022).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah telah memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini,

pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan termasuk sumber daya alam dan keuangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mencapai otonomi yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan yang mendukung otonomi daerah dan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Kedua undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, memiliki keterkaitan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan pemerintah daerah kekuasaan lebih dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan menjamin dukungan keuangan untuk mendukung otonomi daerah (Widowati & Fatimah, 2022). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan definisi daerah otonom sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan gagasan sendiri yang didasarkan pada kehendak dari masyarakat dalam sistem NKRI. Pemerintah daerah mendapatkan hak dan kewenangan

untuk melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan mematuhi asas dekonsentrasi, pembantuan dan desentralisasi (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai dengan perpindahan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik dari pusat ke daerah. Akibat perpindahan kewenangan tersebut terjadi peningkatan transfer dana publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan dan barang publik. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah supaya mandiri dalam mengelola keuangan daerah, sehingga mengakibatkan munculnya sistem keuangan daerah yang khusus. Pengelolaan keuangan daerah memainkan peran penting dalam menentukan nasib suatu daerah, pengelolaan keuangan daerah yang optimal memungkinkan sebuah daerah menjadi kuat, berdaya dan semakin berkembang. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan adil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan laporan keuangan sesuai dengan prinsip tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan secara umum (Purba & Silalahi, 2021).

Pada pelaksanaan sistem keuangan daerah, perencanaan awal menjadi sangat penting karena erat kaitannya dengan proses penganggaran. Dalam perencanaan tersebut, tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi dalam bentuk anggaran pemerintah daerah.

Pentingnya anggaran dalam suatu organisasi atau instansi terletak pada perannya sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan. Anggaran adalah suatu rencana awal yang disusun secara terstruktur, dimana setiap rancangan atau rencana merinci kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi di waktu yang akan datang dan memberikan manfaat dalam mencapai tujuan organisasi (Amelinda et al., 2022). Anggaran pemerintah adalah proses penentuan alokasi dana dalam bentuk moneter di setiap kegiatan dan program dimana menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat. Setiap kegiatan memerlukan anggaran yang akan dialokasikan pada program-program yang telah ditentukan atau direncanakan. Salah satu aspek pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mencari sumber pendapatan dan menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengelolaan keuangan daerah adalah metode yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, akuntansi, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah (D. P. Sari et al., 2023).

Keberhasilan otonomi daerah dapat diukur dari sejauh mana pemerintah mampu mengatur keuangan dengan baik. Hal tersebut direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan mengenai definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun periode yang sudah

ditentukan berdasarkan peraturan daerah (D. P. Sari et al., 2023). APBD merupakan rencana kinerja keuangan pemerintah daerah yang disusun untuk satu tahun periode tertentu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana dan penetapan anggaran (Halim & Kusufi, 2012). Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengikuti pedoman yang tertuang dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara garis besar, proses penyusunan APBD dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD, dan terakhir penetapan APBD (Purba & Silalahi, 2021).

Memasuki era baru setelah diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, otonomi daerah telah membawa dampak signifikan pada perkembangan akuntansi sektor publik di negara ini (Armono et al., 2023). Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia beserta departemen-departemennya dengan tujuan sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat (Purba & Silalahi, 2021). Laporan realisasi anggaran adalah wujud dari laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk memperlihatkan hasil kinerja keuangannya dalam satu tahun periode (Susanti et al., 2021). Laporan realisasi anggaran berisi data yang akan digunakan untuk memperkirakan sumber daya ekonomi yang nantinya akan

dialokasikan untuk program pemerintah daerah dalam satu tahun periode, dengan melakukan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan informasi tentang aktivitas keuangan pemerintahan, termasuk kedisiplinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta ikhtisar tentang sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah daerah dalam periode tahun tertentu. Laporan realisasi anggaran juga mencakup perbandingan antara target anggaran yang direncanakan dan realisasinya pada suatu tahun anggaran (Widowati & Fatimah, 2022). Dengan disusunnya laporan realisasi anggaran ini menunjukkan betapa pentingnya peran anggaran dalam suatu organisasi. Efektivitas dan efisiensi bisa dijadikan sebagai kriteria untuk menilai prestasi sebuah organisasi menggunakan laporan realisasi anggaran yang sudah dipresentasikan sebagai wujud pertanggungjawaban (Zhafiri & Trisnaningsih, 2023).

Setiap organisasi pemerintahan memiliki kewajiban untuk selalu memperhatikan prinsip *value for money* atau nilai manfaat terhadap biaya yang dikeluarkan. Sama halnya dengan tuntutan yang diberlakukan oleh masyarakat, pemerintah harus selalu mengutamakan tanggung jawab dalam melaksanakan prinsip *value for money* terutama terkait penyediaan dan pengalokasian sumber daya. Maksudnya, penggunaan sumber daya harus dioptimalkan semaksimal mungkin tetapi tetap efisien dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Sari et al., 2023). Efektivitas pada pemerintahan daerah yaitu bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan

kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisiensi yaitu kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan hingga benar dengan menggunakan dana yang seminimal mungkin (Widowati & Fatimah, 2022). Untuk melihat hasil efektivitas dan efisiensi suatu anggaran belanja terdapat metode yang dilakukan. Metode yang dilakukan untuk melihat efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja, sedangkan metode untuk melihat efisiensi yaitu membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja (Bunna, 2021).

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi setiap tahun baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun tingkat daerah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja di Indonesia antara lain kurangnya pemahaman sumber daya manusia di pemerintah daerah dalam penerapan regulasi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah, keterlambatan pelaksanaan lelang atau kontrak pengadaan, dan keraguan pemerintah daerah dalam memulai kegiatan akibat perencanaan yang tidak matang, beberapa dokumen administrasi yang belum tuntas, kurangnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan anggaran belanja, adanya perubahan kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik, adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan adanya praktik korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran belanja. Dampak dari rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja tersebut juga dapat berdampak negatif terhadap pembangunan di Indonesia, antara lain lambatnya proses

pembangunan, tidak tercapainya target pembangunan, tidak meratanya pembangunan, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dan meningkatnya angka pengangguran (Paat et al., 2019).

Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan pada tahun anggaran 2022 untuk semester pertama, rata-rata penyerapan anggaran belanja pemerintah masih rendah. Namun, tidak disebutkan secara spesifik persentase rata-rata penyerapan anggaran belanja pemerintah pada semester pertama tahun anggaran 2022. Terdapat beberapa kasus rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja di Indonesia, seperti rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, keterlambatan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam, dan rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Namun, penting untuk dicatat bahwa penyerapan anggaran yang rendah tidak hanya terjadi di daerah-daerah tersebut, tetapi juga di daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan solusi-solusi untuk mengatasi rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja di Indonesia, seperti meningkatkan pemahaman sumber daya manusia di pemerintah daerah dalam penerapan regulasi, meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan anggaran belanja, menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan anggaran belanja, mempercepat proses lelang atau kontrak pengadaan, meningkatkan kualitas dokumen administrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah melalui

program pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (Wiryatama, 2023).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Nugraheni (2020) dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang selama periode 2015–2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang bervariasi. Selama periode 2015-2019 hanya di tahun 2018 dan 2019 yang penyerapan anggarannya efektif yaitu sebesar 90,65% di tahun 2018 serta 93,86% di tahun 2019. Namun di tahun 2017 penyerapan anggarannya kurang efektif dengan persentase sebesar 76,91%. Sedangkan penyerapan anggaran di tahun 2015–2016 masuk kategori Cukup Efektif dengan persentase masing-masing 89,96% dan 88,97%. Sedangkan untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang dari periode 2015–2019 tidak efisien. Hal tersebut karena masih banyak pos anggaran yang realisasinya tidak sesuai dokumen pelaksanaan anggaran. Banyak belanja yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disahkan. Maka tidak heran jika setiap tahun anggaran

belanja Disdukcapil Kota Magelang menurun. Namun penurunan anggaran tersebut penyerapan anggarannya masih belum mencapai kategori efisien (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh D. P. Sari et al. (2023) dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2019-2021”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2019-2021 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dilihat dari analisis efektivitas anggaran belanja, dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dari rasio efektivitas anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar 90,13%, tahun 2020 sebesar 95,14%, dan tahun 2021 sebesar 93,62%. Sementara itu, pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2019-2021, dilihat dari analisis efisiensi anggaran belanja, dinilai efisien. Hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar 70,74%, tahun 2020 sebesar 61,43%, dan tahun 2021 sebesar 68,94%. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kriteria efektif dan efisien (D. P. Sari et al., 2023).

Melihat data dari hasil penelitian terdahulu, tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada suatu entitas mengalami perbedaan. Hal tersebut diakibatkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penulis ingin meneliti tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja

daerah suatu entitas yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan sumber portal resmi Provinsi Jawa Tengah atau *jatengprov.go.id*, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mengalami perkembangan pesat dalam pembangunan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, dan sumber daya manusia termasuk di dalamnya teknologi di Jawa Tengah membaik. Selain itu, Jawa Tengah juga berhasil meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023. Penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI ini juga pernah diterima Jateng pada 2019 dan 2020. PPD tersebut dinilai berdasarkan capaian indeks pembangunan manusia (IPM), kebijakan daerah pada penyelenggaraan pendidikan, pembangunan kesehatan, kualitas pembangunan perempuan dan anak, serta konsistensi evaluasi dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki letak strategis di tiga jalur utama mobilisasi perekonomian di Pulau Jawa. Namun, pada kenyataannya perekonomian di Kabupaten Batang masih rendah dimana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang menempati peringkat 29 dari total 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah. Namun, ketergantungan berlebihan pada Pendapatan Asli Daerah juga dapat berdampak negatif jika Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi atau penurunan. Oleh karena itu, pemerintah

daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan dan memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan anggaran belanja. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang termasuk dalam tujuh Kabupaten/Kota yang paling rendah pemasukannya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 (Reza et al., 2022).

Hal ini tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan	No	Kabupaten/Kota	Pendapatan
1	Kota Semarang	5.319.832.790	19	Sukoharjo	2.401.529.962
2	Banyumas	3.773.568.764	20	Demak	2.400.405.766
3	Brebes	3.293.494.179	21	Jepara	2.399.062.011
4	Cilacap	3.219.631.963	22	Karanganyar	2.346.436.745
5	Kebumen	3.044.056.768	23	Banjarnegara	2.259.878.404
6	Pati	2.910.220.672	24	Purbalingga	2.104.113.319
7	Klaten	2.907.327.298	25	Wonosobo	2.070.280.635
8	Tegal	2.905.805.253	26	Rembang	2.054.302.198
9	Pemalang	2.836.842.885	27	Blora	2.012.812.302
10	Magelang	2.719.200.678	28	Temanggung	1.996.489.275
11	Grobogan	2.680.645.523	29	Batang	1.925.617.426
12	Purworejo	2.483.287.920	30	Kudus	1.911.471.464
13	Boyolali	2.480.627.139	31	Kota Surakarta	1.624.395.242
14	Wonogiri	2.477.910.262	32	Kota Tegal	1.298.031.100
15	Semarang	2.457.006.194	33	Kota Pekalongan	1.060.107.482
16	Kendal	2.451.834.514	34	Kota Magelang	1.006.107.354
17	Pekalongan	2.446.656.142	35	Kota Salatiga	1.006.404.906
18	Sragen	2.422.886.893			

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari tabel 1.1 tersebut, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang pada tahun 2020 menempati peringkat 29 dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dan berada satu tingkat di bawah Kabupaten Temanggung. Padahal seyogyanya dengan luas wilayah dan letak geografisnya yang terletak di sepanjang jalan Pantura (Pantai Utara) yang merupakan akses utama mobilisasi masyarakat di Jawa ditambah dengan

hadirnya PLTU Batang yang tentunya sudah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan asli daerah Batang sehingga bisa lebih bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah (Reza et al., 2022).

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) merupakan unit kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. BPKPAD Kabupaten Batang berperan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada periode tahun anggaran 2018 hingga 2022, Pemerintah Daerah mengusulkan berbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk melakukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang selama periode tersebut. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang mungkin muncul dalam pelaksanaan anggaran.

Penilaian efektivitas dan efisiensi di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang lebih difokuskan pada Laporan Realisasi Anggaran yang disusun setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja melalui Laporan Realisasi Anggaran berfokus pada hasil atau *output* yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dengan membandingkan setiap rencana yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan hasil akhir atau *outcome*. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran menjadi alat penting bagi instansi pemerintah untuk berkomunikasi mengenai pencapaian yang telah diraih dan proses pencapaian tersebut. Berikut adalah perkembangan anggaran dan realisasi dari APBD Pemerintah Kabupaten Batang selama periode 2018-2022.

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	1,493,802,913,801.00	1,396,497,214,776.00
2019	1,575,889,543,741.58	1,431,034,432,119.00
2020	1,528,720,277,802.86	1,349,573,485,518.19
2021	1,583,495,924,837.13	1,440,336,907,917.00
2022	1,611,075,729,405.77	1,455,011,002,798.00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, Data diolah, 2023

Tabel 1.2 di atas menunjukkan anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Batang selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Dalam kurun waktu lima tahun periode terjadi realisasi yang tidak memenuhi target, terlihat bahwa antara target dan realisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan dan realisasinya cenderung mengalami fluktuasi, yang artinya terdapat beberapa kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Dari tabel diatas juga dapat dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan anggaran

pada Pemerintah Kabupaten Batang selalu mengalami pasang surut atau dapat dikatakan tidak tetap sehingga mempengaruhi Rasio Efektivitas dan Efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Dalam menghadapi fluktuasi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan anggaran dan mengidentifikasi permasalahan yang mendasar untuk menemukan solusi yang tepat. Upaya perbaikan harus terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Hasil analisis dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa mendatang untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Berdasarkan dasar pemikiran dalam latar belakang permasalahan dan pengamatan terhadap hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah

Daerah Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2018-2022?

2. Bagaimana tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2018-2022?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang selama periode tahun anggaran 2018 hingga 2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan anggaran belanja selama lima tahun terakhir.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- i. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang selama periode anggaran 2018-2022.

- ii. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan ilmu Akuntansi, terutama terkait aspek pelaksanaan anggaran dan belanja yang efektif dan efisien.

- iii. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi penting bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengkaji objek yang sama atau serupa.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan supaya hasilnya dapat menjadi sumber informasi yang berharga dan juga menjadi pertimbangan serta masukan penting dalam upaya meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berdampak positif terhadap pembangunan daerah tersebut.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Berikut ini penjelasan dari setiap bab dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dari penelitian ini akan menjabarkan mengenai latar belakang dari masalah penelitian, kemudian disusul rumusan masalahnya, tujuan dan manfaatnya penelitian yang dilaksanakan ini, serta sistematika penulisannya.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab kedua memiliki dua sub bab yakni tinjauan pustaka dan landasan teori yang dipakai, kemudian kerangka berpikir yang menjelaskan konsep dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga dari penelitian ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian mencakup diantaranya yaitu *setting* penelitian, definisi operasional variabel penelitian,

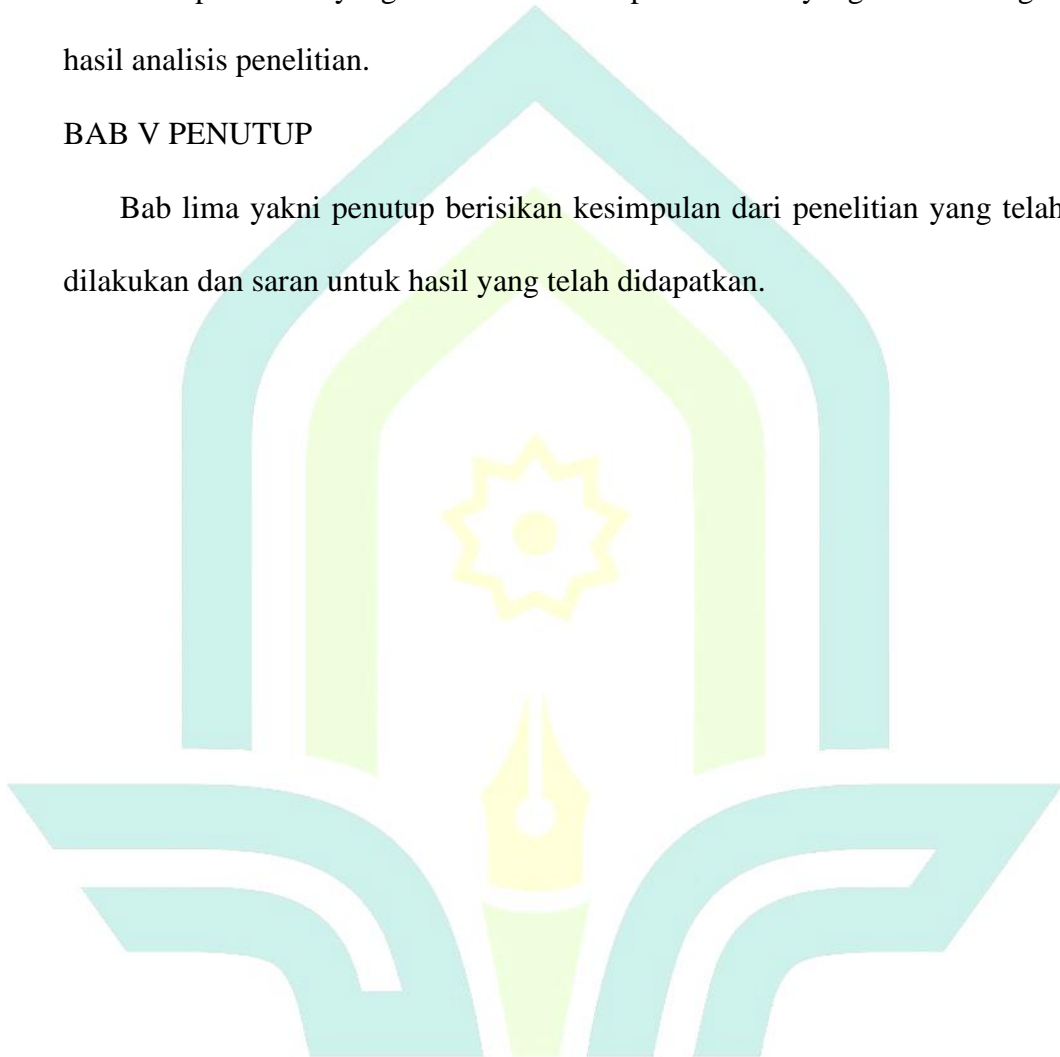
sumber data, teknik pengumpulan, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini akan menjelaskan mengenai profil dari objek penelitian dan hasil penelitian yang ditemukan serta pembahasan yang terkait dengan hasil analisis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima yakni penutup berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk hasil yang telah didapatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada pembahasan dan hasil analisis data yang sudah diuraikan diatas. maka peneliti dapat menyimpulkan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2018-2022 meliputi:

1. Tingkat efektivitas anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022 dikategorikan efektif kemudian pada tahun 2020 termasuk dalam kategori cukup efektif. Selama lima tahun anggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahun yang berbeda-beda dimana pada tahun 2018 tingkat efektifitasnya 93,49%, tahun 2019 tingkat efektivitasnya 90,91%, dan di lanjutkan pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya 88,28%. Kemudian tahun 2021 sebesar 90,96% dan di tahun 2022 sebesar 90,31%. Perbedaan ini terjadi karena beberapa aktivitas yang dianggarkan tidak terlaksana, tetapi kegiatan lain yang sebagian besar telah dianggarkan sudah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan efektif dalam artian sudah mencapai sasaran.
2. Tingkat efisiensi anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2018-2022 secara menyeluruh termasuk dalam kategori cukup efisien. Pada tahun 2018 tingkat efisiensinya sebesar 88,30%, Tahun 2019 tingkat efisiensinya sebesar 85,20. Tahun 2020 tingkat efisiensinya sebesar 87,20%. Tahun 2021 tingkat efisiensinya sebesar 86,17%.

Dilanjutkan tahun 2022 dengan tingkat efisiensinya sebesar 87,12%. Hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran belanja belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam melaksanakan pengelolaan anggaran belanja masih perlu ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Batang agar lebih meningkatkan efektivitas pada tahun mendatang dalam pengelolaan anggaran belanja dengan melakukan perencanaan untuk memenuhi target anggaran yang akan ditetapkan dan memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan sehingga terciptanya kriteria yang sangat efektif. Diharapkan juga untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Batang agar meningkatkan tingkat efisiensinya yang masih dalam kategori cukup efisien dan memperbaiki tingkat efisiensi yang masih mengalami penurunan.
2. Rasio efektivitas serta rasio efisiensi dapat dijadikan landasan untuk menentukan kebijakan dalam pencapaian target untuk periode/waktu yang akan datang dan selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi input/masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Batang agar meningkatkan pengawasan kepada pegawai mengenai anggaran belanja yang dikeluarkan supaya pengeluarannya bisa teratur sesuai anggaran belanja yang sudah dianggarkan.

3. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat meneliti lebih lanjut pelaksanaan anggaran belanja setiap tahunnya dan meneliti tentang jalannya program kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sebaiknya menggunakan alat uji statistik yang lebih baik lagi guna pengembangan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelinda, A., Situmorang, M., Octavianty, E., & Nasution, Y. N. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(2), 271–284.
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10).
- Arisandi, S. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran belanja Dinas PU Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang Tahun 2012-2015. *Universitas Sriwijaya*.
- Armono, D., Widiyaningsih, N., & Nurhayanto. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 323–331.
- BPKPAD. (2017). *Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPAD 2017-2018*.
- Bunna, C. S. H. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. In *Pesquisa Veterinaria Brasileira* (Vol. 26, Issue 2). <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Jarkasih, M., Ruliana, T., & Rachmawati, I. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 11(1), 282–290.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2).
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1433–1441.
- Lexy, J. M. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi.

- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 105–113.
- Mualo, H., & Rohim, A. N. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1).
- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. (2019a). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019b). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 2979–2988.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1–10.
- Purba, S., & Silalahi, M. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja tahun 2014-2019 pada pemko tebing tinggi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Triangle*, 2(1), 142–150.
- Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014–2018. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15.
- Reza, A., Npp, T. 29, Pendaftaran, A., Batang, K., & Tengah, J. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*. <https://www.antaraneews.com/berita/2000633/pembangunan-kawasan-industri-terpadu-batang-terus-dikebut>
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Kinerja*, 15(1), 38–43.
- Sari, D. P., Andriani, E., & Hanum, Z. (2023). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*.
- Sheila, S. D. R., & Rahmi, S. D. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020 Pada Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 292–300.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.

Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.

Susanti, A., Riadi, S., & Sari, D. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 5(3), 153–162.

Syahputra, A. A., & Rahmat, M. (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Ekonomi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3(00), 46–58.

Ulfa, S. M. (2018). *Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan*.

Widiyana, A. (2016). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja pada Dinas Pendidikan. *Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik*.

Widowati, S. A., & Fatimah, A. N. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018). *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 4(1), 71–82.

Wiryatama, H. (2023). Efisiensi Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 307–321.

Zhafiri, R. G., & Trisnaningsih, S. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2436–2445.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Ami Khafida
2. Tempat tanggal lahir : Batang, 24 September 2001
3. Alamat : Jl. Syech Maulana Maghribi, RT 05 RW 03,
Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman,
Kabupaten Batang, Jawa Tengah
4. Nomor *handphone* : 085217207495
5. Nama ayah : Mulari
6. Pekerjaan ayah : Wiraswasta
7. Nama ibu : Kuyaemah
8. Pekerjaan ibu : Pedagang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : MI Al-Ikhsan Ujungnegoro (2007-2013)
2. SMP : SMP Al-Ikhlis Kandeman (2013-2016)
3. SMA : SMK Negeri 1 Batang (2016-2019)

Pekalongan, 26 Oktober 2023



Ami Khafida